PROSIDING SEMINAR NASIONAL LINGKUNGAN LAHAN BASAH
"Meningkatkan Peran Teknologi dan Kecerdasan Buatan dalam Implementasi Ekonomi Sirkuler untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan"
Volume 11 No. 2 – Juni 2026

ANTESEDEN DAN KONSEKUENSI AKUNTANSI FORENSIK BERBASIS LAHAN BASAH DI KALIMANTAN SELATAN: STUDI KUALITATIF

Susi Apriana[a], Syahrial Shaddiq[b], Achmad Suhaili [c], Muhammad Ihsanul Arief[d], Erlan Titoe[e], Steven Kenli[f]

[a-d]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
[e]Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan (MEP), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
[f]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

Email korespondensi: susi.apriana@ulm.ac.id

ABSTRAK

Akuntansi forensik telah menjadi perhatian global dalam menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan yang semakin kompleks, terutama dalam mendeteksi dan mencegah praktik keuangan yang tidak transparan, kecurangan, serta penyalahgunaan sumber daya. Konsep akuntansi forensik berfokus pada investigasi keuangan berbasis bukti untuk mengungkap penyimpangan dalam pengelolaan aset, termasuk dalam sektor yang berkaitan dengan lingkungan lahan basah dan ekonomi berkelanjutan. Di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam, akuntansi forensik berperan penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, sehingga dapat mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan secara lebih efektif. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi anteseden dan konsekuensi penerapan akuntansi forensik terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial terutama dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta mitigasi risiko keuangan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor anteseden meliputi lemahnya pemahaman regulasi, keterbatasan SDM, serta keterbatasan data, sementara konsekuensi penerapan akuntansi forensik memberikan dampak positif pada efisiensi penggunaan dana publik, penguatan tata kelola, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Temuan ini diharapkan menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi penerapan akuntansi forensik yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

Kata kunci: *Akuntansi forensik, lahan basah, transparansi, fraud, pembangunan berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Akuntansi forensik merupakan cabang ilmu akuntansi yang berfokus pada investigasi keuangan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengungkap tindak kecurangan (*fraud*). Praktik ini telah menjadi tren global dalam memperkuat tata kelola keuangan di sektor publik maupun privat. Di Indonesia, urgensi akuntansi forensik semakin meningkat seiring dengan banyaknya kasus korupsi, penyalahgunaan dana publik, serta lemahnya pengawasan dalam proyek pembangunan, terutama di sektor lingkungan (Shaddiq *et al*., 2025).

Kalimantan Selatan merupakan wilayah dengan ekosistem lahan basah yang luas dan memiliki peran penting dalam menopang ekonomi regional maupun nasional. Namun, tata kelola keuangan di

sektor ini masih menghadapi tantangan berupa minimnya transparansi, lemahnya pengendalian internal, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola keuangan sesuai regulasi. Oleh karena itu, penerapan akuntansi forensik berbasis lahan basah di Kalimantan Selatan menjadi relevan sebagai strategi untuk meningkatkan akuntabilitas dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi anteseden penerapan akuntansi forensik dalam pengelolaan keuangan berbasis lahan basah.
2. Mengevaluasi konsekuensi penerapan akuntansi forensik terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
3. Memberikan rekomendasi strategi penerapan akuntansi forensik di Kalimantan Selatan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian 1: Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan melalui:

1. Identifikasi masalah terkait lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berbasis lahan basah di Kalimantan Selatan.
2. Studi literatur mengenai akuntansi forensik, fraud, serta tata kelola sektor publik.
3. Penyusunan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, serta daftar dokumen yang akan dianalisis.
4. Pemilihan narasumber yang meliputi auditor BPK, akademisi, Perbankan, dan pakar akuntansi forensik.

Alat dan Bahan

Penelitian ini menggunakan beberapa alat dan bahan, antara lain:

1. Alat rekam digital untuk merekam wawancara mendalam dengan narasumber.
2. Pedoman wawancara sebagai panduan pertanyaan bagi peneliti.
3. Laptop dan perangkat lunak analisis kualitatif (NVivo/Atlas.ti) untuk mengelola dan menganalisis data.
4. Dokumen resmi berupa laporan keuangan, regulasi pemerintah, serta standar pemeriksaan dari BPK.
5. Catatan lapangan untuk mendokumentasikan hasil observasi partisipatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi untuk menggali pemahaman mendalam mengenai praktik akuntansi forensik di Kalimantan Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

1. **Observasi partisipatif** pada lembaga pengelola keuangan berbasis lahan basah.
2. **Wawancara mendalam** dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan (5 Agustus 2025), pakar akuntansi forensik Dr. Gemi Ruwanti (14 Agustus 2025), Perwakilan Perbankan (10 September 2025) serta pakar akuntansi dan keuangan Dr. Saipudin (12 September 2025).
3. **Analisis dokumen** berupa laporan keuangan, regulasi, dan standar pemeriksaan (SPKN BPK RI, 2021).

Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif Miles & Huberman, mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anteseden Akuntansi Forensik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi anteseden dalam penerapan akuntansi forensik berbasis lahan basah di Kalimantan Selatan. Pertama, aspek regulasi dan kelembagaan masih menjadi tantangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan daerah hanya memiliki kewenangan terbatas dalam melakukan investigasi fraud, sedangkan audit investigasi mendalam sepenuhnya dilakukan oleh unit khusus di tingkat pusat. Keterbatasan kewenangan ini berdampak pada lambatnya proses deteksi dan penindakan kasus penyimpangan di tingkat daerah. Kondisi ini sejalan dengan temuan Rahmawati dan Sari (2021) yang menyatakan bahwa lemahnya regulasi seringkali menjadi penghambat utama implementasi akuntansi forensik dalam sektor publik.

Kedua, kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor yang signifikan. Rotasi pegawai yang tinggi serta minimnya pemahaman terhadap regulasi akuntansi forensik menyebabkan lemahnya deteksi terhadap praktik fraud. Kompetensi auditor maupun pengelola keuangan daerah masih terbatas, sehingga upaya investigasi keuangan belum berjalan optimal. Hal ini memperkuat penelitian Efendi dan Hartono (2020) yang menekankan bahwa kualitas SDM merupakan determinan penting dalam keberhasilan akuntansi forensik.

Ketiga, akses terhadap data menjadi hambatan kritis dalam penerapan akuntansi forensik. Tidak tersedianya data keuangan yang memadai, baik dalam hal transparansi laporan maupun kelengkapan dokumen pendukung, membuat proses investigasi seringkali terhambat. Menurut Setiawan dan Putra (2019), keterbukaan data publik merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana, sehingga tanpa adanya akses data yang baik, penerapan akuntansi forensik tidak dapat berjalan efektif.

Konsekuensi Akuntansi Forensik

Konsekuensi dari penerapan akuntansi forensik dalam pengelolaan keuangan berbasis lahan basah menunjukkan dampak yang signifikan dalam tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi ekonomi, akuntansi forensik terbukti mampu meningkatkan efisiensi alokasi dana publik. Dengan adanya investigasi keuangan yang lebih ketat, pemborosan anggaran dapat diminimalkan dan dana dapat diarahkan secara tepat sasaran pada program konservasi lahan basah. Temuan ini selaras dengan penelitian Crumbley et al. (2017) yang menyebutkan bahwa akuntansi forensik berkontribusi dalam penguatan tata kelola keuangan publik melalui efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada dimensi sosial**,** penerapan akuntansi forensik mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi dalam pengelolaan dana, terutama pada program bantuan masyarakat dan pembangunan berbasis lingkungan, memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap kebijakan publik. Hal ini konsisten dengan laporan ACFE (2022) yang menunjukkan bahwa keberadaan akuntansi forensik meningkatkan kepercayaan stakeholder melalui pencegahan dan deteksi fraud.

Sedangkan pada dimensi lingkungan, penerapan akuntansi forensik memberikan kontribusi pada keberlanjutan pengelolaan lahan basah. Dengan adanya akuntabilitas dalam penggunaan dana, eksploitasi sumber daya alam dapat diminimalisir dan proyek-proyek pelestarian lingkungan dapat dijalankan secara lebih berkelanjutan. Penemuan ini diperkuat oleh World Bank (2020) yang menekankan bahwa akuntabilitas keuangan memiliki hubungan erat dengan efektivitas pengelolaan lingkungan, terutama pada wilayah dengan ekosistem yang rentan seperti lahan basah.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan akuntansi forensik sangat ditentukan oleh tiga faktor utama: regulasi, kapasitas SDM, dan ketersediaan data. Kompleksitas konteks lahan basah menambah dimensi baru dalam penerapan akuntansi forensik, karena tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan studi Efendi & Hartono (2020) serta Setiawan & Putra (2019) yang menekankan pentingnya integrasi antara sistem pengawasan keuangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, penerapan akuntansi forensik berbasis lahan basah di Kalimantan Selatan tidak hanya relevan untuk memperkuat tata kelola keuangan, tetapi juga strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya (Efendi & Hartono, 2020; Setiawan & Putra, 2019) bahwa keberhasilan akuntansi forensik sangat bergantung pada dukungan regulasi, kompetensi SDM, dan akses data. Konteks lahan basah menambah kompleksitas karena menyangkut aspek ekologi dan keberlanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa anteseden penerapan akuntansi forensik berbasis lahan basah di Kalimantan Selatan meliputi keterbatasan regulasi, rendahnya kapasitas SDM, serta minimnya ketersediaan data keuangan. Konsekuensi penerapannya berdampak positif terhadap efisiensi alokasi dana publik, peningkatan kepercayaan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Temuan ini menegaskan bahwa akuntansi forensik berperan penting dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas SDM, akses data, serta integrasi akuntansi forensik ke dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa anteseden penerapan akuntansi forensik berbasis lahan basah di Kalimantan Selatan meliputi regulasi, kapasitas SDM, dan ketersediaan data. Konsekuensinya adalah peningkatan efisiensi ekonomi, transparansi sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Untuk memperkuat implementasi, diperlukan strategi berupa:

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan akuntansi forensik.
2. Penguatan regulasi dan akses publik terhadap laporan investigasi.
3. Integrasi akuntansi forensik dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan, Bank Kalsel, para pakar dan akademisi yang telah menjadi narasumber, serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) & Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang telah memberikan dukungan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Albrecht, W. S., Albrecht, C. C., & Albrecht, C. O. (2019). Fraud Examination (6th ed.). Boston: Cengage Learning.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2022). Report to the Nations: 2022 Global Study on Occupational Fraud and Abuse. Austin, TX: ACFE.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2021). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Jakarta: BPK RI.

Crumbley, D. L., Heitger, L. E., & Smith, G. S. (2017). Forensic and Investigative Accounting (8th ed.). Chicago: Wolters Kluwer.

Efendi, M., & Hartono, J. (2020). Akuntansi forensik dalam mendukung tata kelola keuangan publik

di Indonesia. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(3), 567–582. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.33

International Federation of Accountants (IFAC). (2020). Handbook of International Standards on Auditing (ISA). New York: IFAC.

Rahmawati, D., & Sari, R. (2021). Implementasi akuntansi forensik dalam mendeteksi fraud sektor publik. Jurnal Akuntansi Publik Indonesia, 6(2), 101–115.

Setiawan, A., & Putra, B. (2019). Peran akuntansi forensik dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana publik. Jurnal Riset Akuntansi dan Audit, 10(1), 45–58.

World Bank. (2020). Environmental and Social Accountability in Wetland Management. Washington, DC: The World Bank Group.

Yolanda, S., Shaddiq, S., Faisal, H., & Kurnianti, I. (2023). Peran manajemen keuangan digital dalam pengelolaan keuangan pada UMKM di Banjarmasin. Indonesian Red Crescent Humanitarian Journal, 2(1), 23-32.

Sari, M. P., Ar, F., Pibriani, W. A., Shaddiq, S., Siregar, B. A., & Alhempi, R. R. (2023). Effect of Environmental Uncertainty, Competence of Human Resources and Infrastructure on Quality of Financial Statements. International Journal of Latest Technology in Engineering, Management & Applied Science, 12(01), 18-28.

Shaddiq, S., Imansyah, M. H., Nur, M. A., Rahmini, N., Suhaili, A., & Apriana, S. (2025). Sosialisasi Ekonomi Syariah Berbasis Lahan Basah di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin, 5(1), 131-134.